



**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.  
728K/PDT.SUS/2012)**

**SKRIPSI**

**ANGGI PIRIMAYANTO  
111 0612 029**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2015**



**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.  
728K/PDT.SUS/2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**ANGGI PIRIMAYANTO**

**111 0612 029**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2015**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : ANGGI PIRIMAYANTO  
NRP : 1110612029  
TANGGAL : 27 Januari 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 26 Januari 2015

Yang Menyatakan,



(Anggi Pirimayanto)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggi Pirimayanto  
NPM : 1110612029  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
JenisKarya : TugasAkhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG RI NO. 728K/PDT.SUS/2012)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Januari 2015

Yang menyatakan,

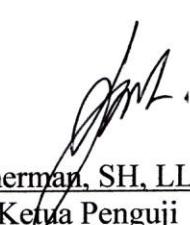
  
(Anggi Pirimayanto)

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Anggi Pirimayanto  
NRP : 1110612029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Bagi Kreditor Minoritas Terhadap Perusahaan Yang Telah Dijatuhi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 728K/PDT.SUS/2012)

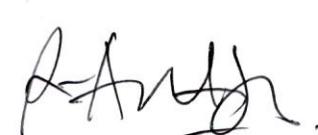
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Suherman, SH, LLM  
Ketua Penguji

  
Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Penguji I

  
Hj. Devi Kantini R, SH., SpN., Mkn  
Penguji II

  
Drs.Djamhari Hamza, SH, MH,MM  
Dekan

  
Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 26 Januari 2015

**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.  
728K/PDT.SUS/2012)**

**Anggi Pirimayanto**

**Abstrak**

PKPU adalah suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa debitör mempunyai utang yang sudah tiba waktunya untuk dibayarkan kepada kreditor namun debitör meminta kepada kreditor untuk membayar utangnya pada kemudian hari untuk menghindari pailit. Maksud dari PKPU pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh debitör. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada debitör untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan debitör meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran untuk menghindari kepailitan. Dalam rencana perdamaian ini sering kali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitör sendiri, misalnya debitör berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditor lain. kemungkinan terjadinya hal tersebut karena unsur kesengajaan dari pihak debitör yang sudah bekerjasama dengan para kreditornya, terutama kreditor mayoritas yang terafiliasi dengan debitornya, terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan PKPU kepada debitör dan mengesahkan perdamaian agar berlaku penundaan biaya utang kepada kreditor lain sehingga merugikan bagi kreditor minoritas.

**Kata Kunci : PKPU, Kreditor Minoritas, Upaya Hukum.**

**ANALISA YURIDIS BAGI KREDITOR MINORITAS TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TELAH DIJATUHI PUTUSAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI  
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.  
728K/PDT.SUS/2012)**

**Anggi Pirimayanto**

**Abstract**

PKPU is a state that shows that the debtor has a debt that has come to be paid to the creditor but the debtor asks creditors to pay debts at a later date to avoid bankruptcy. The purpose of the PKPU in general is to bid the peace plan by the debtor. The peace plan actually provides the opportunity for debtors to restructure its debts, which may include payment of all or part of the debt to the concurrent creditors. Thus it can be said that PKPU contains the aim to allow the debtor to continue his efforts despite the hardship payments to avoid bankruptcy. In this peace plan often occurs fraud committed by a creditor or the debtor itself, for example, the debtor seeks to provide benefits to one or several specific creditors, causing losses to other creditors. the possibility that because of the element of intent on the part of the debtor who has been working with its creditors, especially the majority of creditors affiliated with debtors, prior to verdict PKPU to debtors and ratify the peace that applies delay debt costs to other creditors to the detriment of the minority creditors.

**Keywords:** PKPU, Minority Creditors, Remedies.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak 6 Oktober 2014 ini adalah Analisa Yuridis Bagi Kreditor Minoritas Terhadap Perusahaan Yang Telah Dijatuhi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 728K/PDT.SUS/2012). Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH., SpN., MKn selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayahanda Oloan, Ibunda Nurmaini serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 26 Januari 2015

Penulis



(Anggi Pirimayanto)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	5
I.3 Ruang Lingkup Penulisan .....	5
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	7
I.6 Metode Penelitian .....	13
I.7 Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN	
PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	17
II.1 Pengaturan PKPU Berdasarkan Undang-Undang .....	17
II.2 Pengertian PKPU .....	19
II.3 Pihak Yang Berhak Mengajukan PKPU .....	22
II.4 Permohonan Pengajuan PKPU .....	25
II.5 Akibat Hukum Dari PKPU .....	26
II.6 Perdamaian ( <i>Akkord</i> ) Dalam PKPU .....	34
II.7 Restrukturisasi Utang Dalam PKPU .....	37
II.8 Pengakhiran PKPU .....	38
BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR	
728K/PDT.SUS/2012.....	40
III.1 Posisi Kasus .....	40
III.2 Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No. 728K/PDT.SUS/2012 .....	44
BAB IV ANALISA KASUS UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR	
MINORITAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH	
DIJATUHI PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN	
PEMBAYARAN UTANG.....	52
IV.1 Hasil Dari Putusan Pengesahaan Perdamaian Tanpa Hadirnya Kreditor Lain	
Dalam Kasus PKPU Antara PT. Maja Agung Latexindo Dengan PT. Bank	
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	52
IV.2 Upaya Hukum Bagi Kreditor Minoritas Terhadap Perusahaan Yang Telah	
Dijatuhi Putusan PKPU Dalam Kasus PKPU Antara PT. Maja Agung	
Latexindo Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .....	62

BAB V PENUTUP.....	65
V.1 Kesimpulan .....	65
V.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	